# BAB IPENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang menggenggam globalisasi saat ini, kegiatan hubungan internasional bisa dikatakan telah memasuki era jalur tanpa hambatan. Interaksi satu negara dengan negara lain sudah tidak kaku dan terlihat lebih mudah dilakukan. Berlandaskan hal itu, maka penulis mengawali tulisan ini dengan asumsi sederhana bahwa terdapat perubahan yang terjadi dalam aktivitas diplomasi antar negara.

Profesor Mowat dalam bukunya “*Diplomacy and Peace*” membedakan tiga periode perkembangan diplomasi; yang pertama terjadi tahun 476-1475 meliputi periode kegelapan ketika diplomasi belum terorganisir. Periode kedua (1473-1914) dikenal juga sebagai “Sistem negara Eropa”, dan periode ketiga dimulai setelah diplomasi terbuka yang diperkenalkan oleh Presiden Woodrow Wilsow (1918) melalui pidato “*Fourteen Points*” nya. Poin pertama Presiden Wilson yang berbunyi: “...*Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view”,* hal ini menurut Sukawarsini Djelantik dalam Yulius P. Hermawan (2007) menandai era diplomasi yang demokratis.[[1]](#footnote-1)

Era diplomasi yang demokratis inilah yang menjadikan peran dan aktivitas diplomasi lebih melibatkan masyarakat melalui aktivitas diplomasi publik atau diplomasi multijalur, bukan lagi diplomasi tradisional yang melibatkan pejabat-pejabat negara. Perihal perubahan arah diplomasi ini, Adam Watson[[2]](#footnote-2) juga pernah menyatakan “perlunya meninjau ulang topik-topik diplomasi di tahun 1980-an. Tahun 1980-an juga menandai menurunnya pengaruh menteri luar negeri. Selain itu terdapat peningkatan keterlibatan langsung kepala pemerintahan dalam penyusunan materi kebijakan luar negeri, dan meningkatnya peran media massa dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri.”

Secara garis besar, praktek diplomasi masa kini dipengaruhi oleh beberapa hal, tiga diantaranya adalah: Revolusi teknologi informasi; Meningkatnya peran media massa; dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional.[[3]](#footnote-3)

Penjelasan mengenai pengaruh revolusi teknologi informasi dalam praktek diplomasi dipertegas ketika Guttenberg menemukan mesin cetak 5 abad yang lalu, dimana akses informasi tidak lagi terbatas dan dimiliki oleh kelompok-kelompok ekslusif dalam pemerintahan. Elemen dasar perubahan diplomasi adalah tersedianya jaringan komputer dan elektronik. Mengenai perubahan-perubahan tersebut, Barry Fulton[[4]](#footnote-4) menjabarkan lebih jauh:

“... Negara-negara yang sebelumya dihubungkan oleh Kementerian Luar Negeri dan aktivitas perdagangan, sekarang terhubung melalui aktivitas komunikasi antar individu melalui teknologi serat optik, satelit, *wireless*, yang merupakan bagian dari sebuah jaringan yang kompleks dan tanpa pengawasan terpusat. Teknologi transportasi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat bukan lagi masalah relevan, sehingga diplomasi tradisonal berjuang untuk mempertahankan relevansinya.”[[5]](#footnote-5)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hubungan internasional (diplomasi publik) menjadi faktor kedua yang berpengaruh dalam praktek diplomasi. Aktivitas diplomasi publik telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama, yaitu yang semata-mata dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah, dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antar negara. Karena kegagalan diplomasi yang hanya mengandalkan kegiatan diplomasi jalur pertama inilah, maka berkembang pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai alat alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara.[[6]](#footnote-6)

Diplomasi publik berkaitan dengan berubahnya sikap masyarakat dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri yang tidak lagi dibatasi oleh interpretasi yang diberikan oleh diplomat tradisional. Era keterbukaan dewasa ini tidak memungkinkan lagi bagi kerahasiaan dan ekslusivitas informasi. Melalui media massa internasional, pendapat bergerak secara cepat melalui jaringan global yang dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah, perusahan, dan NGOs, maupun individu-individu yang berkepentingan.[[7]](#footnote-7)

Faktor ketiga yang berpengaruh adalah meningkatnya peran media massa. Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa halangan birokratis. Media massa modern telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Peranan mereka dalam menyediakan informasi melalui satelit, sangat membantu dalam menyediakan data sebagai bahan baku bernegosiasi.[[8]](#footnote-8)

Peran media massa telah disadari sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan diplomasi masa kini. Pernyataan Lord Palmerston yang terkenal: “opini lebih kuat daripada tentara” akan semakin relevan dalam konteks ini. Relevansinya akan semakin signifikan ketika aktivitas informasi telah dimobilisasi dan melalui aktivitas propaganda.[[9]](#footnote-9)

Revolusi komunikasi juga telah merubah peraturan-peraturan diplomatik. Meskipun diplomasi tradisional dan instrumen-instrumen militer masih diperlukan, akan tetapi hal itu tidak lagi mencukupi. Keberhasilan sebuah kebijakan juga menuntut dukungan rakyat dan pemimpin dari negara lain. Para diplomat harus berhasil memobilisasi dukungan koalisi bagi kebijakan mereka, tidak hanya demi mewakili kepentingan rakyatnya, tapi juga konsekwensinya terhadap tekanan publik di negara lain. Karena pernyataan-pernyataan para diplomat di dalam negeri akan dipublikasikan secara instan oleh media internasional, penjelasan kebijakan mereka harus konsisten dan persuasif bagi rakyat di dalam dan luar negeri. Hal ini telah menjadi keperluan politik dan jauh lebih utama daripada aktivitas hubungan masyarakat atau sekedar memperoleh pemberitaan yang baik.[[10]](#footnote-10)

Ketiga faktor diatas cukup meyakinkan penulis bahwa nyatanya aktivitas diplomasi dunia telah mengalami pergeseran, berawal dari diplomasi tradisional menuju diplomasi publik. Selanjutnya, penulis mencoba menganalisa lebih jauh faktor dominan apa yang mempengaruhi arah diplomasi publik dewasa ini. Asumsi berikutnya yang tercipta adalah bahwa peran media massa-lah yang menjadi faktor dominan, persis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seorang mantan Menlu AS, George Shulz, menegaskan bahwa: “Bahan baku diplomasi adalah informasi: bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan menempatkannya dalam sistem”. Perubahan fundamental dalam moda komunikasi akan membawa pengaruh yang mendalam dalam praktek berdiplomasi.[[11]](#footnote-11)

Secara normatif fungsi media dapat digambarkan[[12]](#footnote-12) menjadi enam poin. Pertama, media seharusnya memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang telah terjadi di sekitar mereka. Kedua, media seyogyanya memberikan pendidikan berdasarkan makna dan signifikansi dari data yang ada. Ketiga, media memberikan ruang publik bagi masyarakat guna mendiskusikan isu-isu yang berkembang dan dianggap gawat. Keempat, memberikan fasilitasi bagi terjadinya pendapat umum. Kelima, memberikan ruang untuk publisitas kepada lembaga-lembaga pemerintah dan kehidupan politik. Keenam, memberikan layanan advokatif bagi pandangan-pandangan politik yang berbeda, terutama yang berada di luar arus utama seperti kelompok minoritas yang termarjinalisasi.

Namun di dalam kenyataannya, pendekatan normatif seperti ini seringkali tidak berjalan. Media massa berkecenderungan “menciptakan dunia” sebagaimana yang mereka ingin maknai. Konsekuensi dari hal ini adalah media jadinya tidak hanya bermain peran sebagai “pelapor” berita dunia saja. Lebih jauh menurut Brian White, et.al[[13]](#footnote-13), laporan dari media ini akan menghasilkan umpan balik dan sekaligus menghasilkan akibat langsung pada peristiwa berikutnya.[[14]](#footnote-14) Sebagai contoh nyata, adalah media massa yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya: Cable News Network atau CNN. Sebuah jaringan berita global pertama yang berhasil menjadi aktor global dalam hubungan internasional saat Perang Teluk 1990-1991. Keberhasilan CNN meliput dan mengulasberita internasional tersebut menginspirasi organisasi penyiaran lainnya, salah satunya adalah BBC.

Aktivitas penyiaran CNN diasumsikan memberikan dampak pada perumusan kebijakan (aktivitas diplomasi) sebuah negara, atau biasa disebut *CNN effect*. Feist (2001, p. 713) menulis: "*The CNN effect is a theory that compelling television images, such as images of a humanitarian crisis, cause U.S. policymakers to intervene in a situation when such an intervention might otherwise not be in the U.S. national interest.*"[[15]](#footnote-15)

Schorr (1998) mendefinisikan *CNN effect* sebagai "*the way breaking news affects foreign policy decisions,*"[[16]](#footnote-16) ketika Livingston and Eachus (1995, p. 413) mendefinisikannya "*as elite decision makers' loss of policy control to news media.*"[[17]](#footnote-17)

Menurut Seib (2002), *CNN effect* "*is presumed to illustrate the dynamic tension that exists between real-time television news and policymaking, with the news having the upper hand in terms of influence*" (p. 27).[[18]](#footnote-18)

Pernyataan para peneliti diatas makin meyakini penulis bahwa media massa memiliki kekuatan besar untuk sekedar mempengaruhi secara tersirat. Strobel (1997) juga sempat menulis, "*I found no evidence that the news media, by themselves, force U.S. government officials to change their policies. But, under the right conditions, the news media nonetheless can have a powerful effect on process. And those conditions are almost always set by foreign policy makers themselves or by the growing number of policy actors on the international stage.*"[[19]](#footnote-19)

Sebelum terlalu jauh berbicara mengenai keterlibatan CNN sebagai media massa dalam aktivitas diplomasi sebuah negara, terlebih dahulu penulis membuat sebuah batasan atau syarat utama yang membuat negara-negara bisa terpengaruh oleh aktivitas media massa. Arie Indra Chandra menulis bahwa “semakin terbuka sistem politik suatu negara maka semakin besar pengaruh media massa terhadap kehidupan politik negara tersebut,” maka dipilihlah Amerika Serikat sebagai aktor yang terkait.

Salah satu ciri dari sistem politik yang terbuka adalah berfungsinya pendapat umum dalam mekanisme pengambilan keputusan publik, dan pendapat umum sendiri dibentuk terutama oleh media massa. Bahkan media massa dapat dikatakan sebagai “pilar keempat” dari sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui pendapat umum yang menginternasional pula, media massa mempunyai peluang untuk menggiring sesuatu menjadi isu internasional atau tidaknya. Meskipun suatu persoalan pada awalnya merupakan perihal atau masuk ranah domestik dan dikelola sebatas domestik, akan berubah menjadi masalah internasional ketika media massa mengeskposenya sehingga menjadi perhatian dunia.[[20]](#footnote-20)

Kembali pada bahasan peran media massa dalam pembentukan opini publik yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan kebijakan sebuah negara, konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998 lalu dapat dijadikan sebagai alat uji.

Konflik Bosnia mengikutsertakan Kroasia, Serbia, dan NATO sebagai pemeran penting. Pada April 1992, Bosnia mendeklarasikan sebagai negara berdaulat yang merdeka dari Yugoslavia. Dengan demikian, populasi Bosnian Serb (kaum Serbia yang tinggal di Bosnia) bersitegang dengan masyarakat Muslim Bosnia dan Kroasia. Serbia membenarkan agresi mereka dengan mengklaim bahwa Presiden Bosnia, Alija Izetbegovic ingin mengubah Bosnia menjadi negara Islam fundamentalis. (Dia dianggap sebagai moderat agama oleh para diplomat Barat.) Milisi Serbia, yang didukung oleh angkatan bersenjata Serbia, menguasai dua pertiga dari Bosnia. Setelah itu, orang-orang Serbia Bosnia meluncurkan pemerintahan teror terhadap penduduk Muslim di negara itu.[[21]](#footnote-21)

Perdebatan siapa dalang utama dalam konflik ini terus terjadi. Seorang professor Indiana University School of Journalism di Indianapolis, Sherry Ricchiardi menulis di sebuah kolom internet. Dalam kolomnya, Sherry mengutip pernyataan Roy Gutman, seorang reporter Newsday yang memenangkan Pulitzer Prize dalam liputannya yang mengekspos kamp konsentrasi Serbia. “*Why had the international press corps hesitated for so long to clarify who the aggressors were in the Balkans? Why had they fallen back on a seemingly neutral, ‘all sides are to blame’ reporting agenda that may have defused public opinion? And why hadn't Americans, supposed champions of democracy, acted sooner?”* Jawaban asumsi diberikan pada paragraf selanjutnya, “*Indeed, many Balkans-watchers believed battles were being fought on two fronts: one in the trenches, for territorial gains; the other for western public opinion.*”

Ada asumsi yang menyatakan bahwa sulitnya menentukan dalang dalam kasus ini dikarenakan pihak berwenang terlebih dahulu menunggu hasil opini publik yang terbentuk atas setiran media massa. Kejadian serupa pun terjadi pada Konflik Kosovo 1998. Maka, Konflik Bosnia 1992 dan dan Konflik Kosovo 1998 dapat menjadi laboratorium kasus bahwa media internasional berkontribusi besar dalam mempengaruhi kelanjutan kasus ini.

Oleh karena poin-poin yang telah dijabarkan diatas itulah, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif dengan judul:

“**Peran** **Cable News Network (CNN) dalam Aktivitas Diplomasi Amerika Serikat: Studi Kasus pada Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998**”

## 1.2 Identifikasi Masalah

 Berdasarkan gambaran permasalahan di atas dan untuk mempermudahkan penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Cable News Network (CNN) sebagai media massa dan aktor diplomasi publik?
2. Bagaimana aktivitas diplomasi yang terjadi di Amerika Serikat khususnya dalam perumusan kebijakan luar negeri?
3. Bagaimana Cable News Network (CNN) berperan dalam aktivitas diplomasi Amerika Serikat?

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang dibahas, maka penulis membuat suatu pembatasan masalah agar masalah yang dibahas tidak keluar dari topik bahasan. Penulis membatasi pada peran CNN sebagai media massa dan aktor diplomasi publik pada aktivitas diplomasi Amerika Serikat saat terjadinya Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah untuk mempermudah analisis. Perumusan yang dikemukakan adalah:

**“Bagaimana peran Cable News Network (CNN) sebagai aktor diplomasi publik sehingga dapat mempengaruhi aktivitas diplomasi Amerika Serikat jika dilihat dari Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998?”**

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penulis membuat penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui peran Cable News Network (CNN) sebagai media massa dan aktor diplomasi publik.
2. Untuk mengetahui aktivitas diplomasi Amerika Serikat, khususnya dalam perumusan kebijakan luar negeri.
3. Untuk mengetahui peran Cable News Network (CNN) dalam aktivitas diplomasi Amerika Serikat yang terjadi saat Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu (S-1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Menambah ilmu dan wawasan, khususnya dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional mengenai peranan yang dilakukan oleh CNN dalam aktivitas diplomasi Amerika Serikat dilihat dari Konflik Bosnia 1991.
3. Dapat memberi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi Hubungan Internasional serta peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.

## 1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk membantu penelitian ini, penulis membutuhkan teori-teori yang kemudian dijadikan kerangka teoritis sehingga dapat menjadi dasar atau pendukung penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut juga diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini hingga akhirnya pesan yang dimaksud oleh penulis bisa disampaikan dengan baik.

Pertama, dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori Hubungan Internasional karena yang menjadi dasar penelitian ini adalah Hubungan Internasional. Secara umum, Schwarzenberger menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relation*).[[22]](#footnote-22) Secara khusus, Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti sempit ini menunjukkan bahwa di samping negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain.[[23]](#footnote-23) Selain itu, Hubungan Internasional dapat didefinisikan pula sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis atau subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya.[[24]](#footnote-24)

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi, studi hubungan internasional menitikberatkan pada dua hal: siapa dan melakukan apa. Mari kita bahas lebih detail satu per satu.

Salah satu aktor yang berperan dalam hubungan internasional adalah media massa. Namun sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal itu, penulis terlebih dahulu melihat konsep yang lebih luas, yaitu komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communico* yang berarti membagi: gagasan, ide, atau pikiran antara seseorang dan orang lain (Cangara, 2002: 18). Secara terminologis, para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif, yakni perspektif filsafat dan sosiologis.[[25]](#footnote-25)

1. Dalam perspektif filsafat, merujuk pada kerangka yang sering dikutip dalam buku Aristoteles yang berjudul De Arte Rhetorica. Aristoteles merumuskan komunikasi pada tiga komponen pokok, yaitu: siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan.
2. Dipandang dari perspektif sosiologis, Edwin Neumann mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi berfungsi (Rakhmat, 1997: 8). Lebih lanjut, Rakhmat menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang hubungan sosial di mana individu-individu berinteraksi dan saling memengaruhi (Rakhmat, 2007: 10). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sosiologi menitikberatkan komunikasi dalam konteks interaksi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok.[[26]](#footnote-26)

Karena penelitian ini berbasis hubungan internasional, maka secara spesifik komunikasi yang dilakukan pun dalam lingkup internasional. Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan, dan kerjasama, melalui berbagai media komunikasi atau media massa internasional.[[27]](#footnote-27) Secara lebih spesifik dijelaskan Liliweri (2001: 22), bahwa studi komunikasi internasional disandarkan atas pendekatan-pendekatan maupun metodologi, salah satunya pendekatan media (*media approach*): pendekatan yang mengkaji berita internasional melalui suatu media atau multimedia.[[28]](#footnote-28)

Ditinjau dari pendekatan interaksi yang digunakan, komunikasi internasional dapat dipelajari dari beberapa perspektif, yaitu: perspektif jurnalistik, perspektif diplomatik, perspektif propagandistik, perspektif kulturasik, dan perspektif bisnis.[[29]](#footnote-29) Namun, perspektif yang mewakili penelitan ini terangkum menjadi tiga hal:

1. Perspektif Jurnalistik

Komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat *mass mediated communication* (MMC) yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang. Kegiatan komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik berupa pertukaran informasi tentang peristiwa internasional untuk memengaruhi opini publik internasional.[[30]](#footnote-30)

1. Perspektif Diplomatik

Komunikasi internasional adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain melalui saluran diplomatik. Dalam perspektif ini, komunikasi internasional berupaya untuk membina rasa saling percaya atau memperteguh keyakinan terhadap suatu gagasan. Berbagai kunjungan kenegaraan dan keikutsertaan dalam konferensi internasional merupakan bagian dari perspektif diplomatik komunikasi internasional.[[31]](#footnote-31)

1. Perspektif Propagandistik

Komunikasi internasional lebih ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan. Upaya propraganda bukan sekedar untuk mengarahkan opini publik internasional, melainkan untuk memengaruhi pikiran, perasaan, serta tindakan pemerintah dan khalayak (publik) di negara lain, baik negara lawan atau kawan.[[32]](#footnote-32) Selama ini, propaganda memang diakui merupakan instrumen yang paling ampuh untuk menanamkan pengaruh. Hal ini dapat dilihat ketika propaganda berhasil mewujudkan kecocokan opini publik satu negara dan negara lain sehingga berintegrasi menjadi opini internasional.

Komunikasi internasional yang melibatkan media massa internasional secara otomatis melibatkan pers dalam pergerakannya. Oleh sebab itu, penulis menyisipkan gagasan *framing* beserta analisisnya sebagai peluru yang digunakan oleh media massa dalam menyajikan suatu berita. Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo, 1999a:23). Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandalkan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Dalam praktiknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya (Sudibyo, 1999b: 176).[[33]](#footnote-33)

Selanjutnya, penulis menyajikan beberapa penelitian yang melakukan pengamatan terhadap perkembangan operasionalisasi pers dengan menghubungkan sistem media dengan aspek-aspek kemasyarakatan tertentu. Teori pers dalam perkembangannya tak banyak bergeser kecuali terjadinya modifikasi atau revisi dari teori yang pernah ada.[[34]](#footnote-34) Beberapa teori diantaranya adalah: Teori Sosial-Sentralis; Teori Pembagian Tiga Dunia; Teori Sosialis Demokratik; Teori Permisif-Paternalistik-Otoritarian. Namun sekali lagi, hanya terdapat satu teori yang sesuai dengan penelitian kali ini, yaitu:

1. Teori Permisif-Paternalistik-Otoritarian[[35]](#footnote-35)

Sydney Head, penulis buku *World Broadcasting System* (1985) mengamati bahwa Amerika Serikat dan Inggris, yang sangat dekat dengan demokrasi Barat, telah membentuk “gaya yang benar-benar berbeda mengenai kepemilikan dan keabsahan hukum atas sistem siaran nasionalnya”. Teori permisif-peternaslistik-otoritarian itu tergambar dalam model bahwa AS meninggalkan operasi dan kepemilikan dari sifat siaran yang membebaskan perusahaan. Head memberikan ciri sistem AS sebagai permisif, yang bergantung pada kekuatan pasar dan kebutuhan konsumen.

Jika dari tadi teori-teori di atas lebih menjabarkan siapa yang saja aktor yang terlibat dalam Hubungan Internasional, maka garis bawah selanjutnya adalah mengenai apa yang dilakukan.

Hubungan Internasional berbicara mengenai politik luar negeri. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan internasional.[[36]](#footnote-36) Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[37]](#footnote-37) Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabiitas yang dimilikinya.[[38]](#footnote-38)

Dalam kelanjutannya, politik luar negeri suatu negara akan menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri yang berdasar pada kepentingan nasional negaranya masing-masing.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[39]](#footnote-39) Sedangkan kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital.[[40]](#footnote-40)

Menurut Wittkopff dkk dalam bukunya yang berjudul *American Foreign Policy*, di beberapa kesempatan AS secara terang-terangan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dengan menggunakan kekuatan militer, atau biasa disebut dengan intervensi militer. Label interevensi pertama kali secara luas digunakan untuk menggambarkan kebijakan luar negeri Amerika saat Perang Dingin. Dengan situasi konflik global yang terjadi, intervensi menjadi bagian dari perjuangan ideologis Amerika Serikat untuk menghancurkan komunisme Soviet. Namun, sejak awal 1990-an, intervensi kemanusiaan sebagai intervensi jenis baru kemudian muncul. Hal ini terjadi karena adanya perubahan lingkungan dimana masalah kemanusiaan dan nilai-nilai internasional yang menjadi fokus utama. Intervensi di Somalia (1992), Haiti (1994), Bosnia (1995), and Serbia/Kosovo (1999) sesuai dengan pola ini.

Selain melakukan intervensi dalam mencapai kepentingan nasionalnya, studi Hubungan Internasional juga mengenal sebuah istilah bernama diplomasi. Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-akor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.[[41]](#footnote-41)

Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Teori sistem dapat dipakai untuk menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh Jervis, sebuah sistem dibentuk oleh kenyataan yang berubah di satu bagian sistem serta menyebabkan terjadinya perubahan di bagian lain. Perubahan dalam kebijakan luar negeri akan merubah praktik diplomasinya.[[42]](#footnote-42) Karakteristik kedua dari sistem adalah pengkondisian. Kebijakan luar negeri akan dirancang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh staf diplomatiknya. Suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri. Hubungan antara dua aktor akan tergantung sebagian pada hubungan di antara aktor-aktor tersebut dan aktor lainnya yang terdapat dalam sistem. Hal ini berarti bahwa apakah aktor-aktor yang bekerjasama atau menentang satu sama lain akan dipengaruhi oleh aktor di luar hubungan bilateral mereka.[[43]](#footnote-43)

Dalam praktiknya, diplomasi pada abad lalu telah ditandai dengan perubahan-perubahan yang luar biasa dengan adanya revolusi teknologi informasi. Revolusi tersebut mengarah pada perubahan penting dalam praktik diplomasi khususnya dalam peran diplomat dan peran Deplu. Selain itu, terdapat peningkatan media massa, tumbuhnya aktor-aktor yang melaksanakan diplomasi jalur kedua, serta meningkatnya peran NGOs dan INGOs.[[44]](#footnote-44) Dengan mulai ditinggalkannya peran seorang “diplomat tradisional”, munculah sebuah istilah baru bernamakan “diplomasi publik”.

Diplomasi publik terkait dengan pengaruh sikap masyarakat terhadap bentuk dan eksekusi kebijakan luar negeri telah memotong dan mengambil alih dimensi hubungan internasional yang dilakukan oleh diplomasi tradsional.[[45]](#footnote-45) Diplomasi publik termasuk aktivitas oleh pemerintah untuk membangun opini publik di negara lain; melakukan interaksi kelompok perorangan dan kepentingan di satu negara dengan negara lain; melaporkan masalah-masalah luar negeri dan pengaruhnya terhadap kebijakan; aktivitas komunikasi antara mereka yang bekerja di bidang komunikasi, selain juga antara diplomat dan koresponden asing, serta proses komunikasi antar budaya.[[46]](#footnote-46)

Mengulang sedikit kata-kata di atas bahwa “diplomasi publik termasuk aktivitas oleh pemerintah untuk membangun opini publik”, maka asumsi dasar HI yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi liberal yang berkeyakinan terhadap kemajuan.

Filsuf liberal, dimulai dari John Locke di abad ke-17, melihat potensi yang besar bagi kemajuan manusia dalam *civil society*.[[47]](#footnote-47) Proses modernisasi didorong oleh revolusi intelektual kaum liberal yang memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran dan rasionalitas manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional.[[48]](#footnote-48)

Tradisi kaum liberal dalam HI didasarkan pada ide dimana negara modern dengan cara-cara yang biasa dan tertentu membuat kontribusi strategis bagi kebebasan dan kemajuan internasional.[[49]](#footnote-49) Mantan Presiden AS, Woodrow Wilson meyakini bahwa, “Melalui organisasi internasional yang didesain secara rasional dan cerdas, dimungkinkan untuk mengakhiri perang dan mencapai perdamaian yang kurang lebih permanen.”

Pemikiran Wilson dan Norman Angell – tokoh kaum idealis liberal lainnya yang terkenal dari era yang sama, didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia dan masyarakat manusia: manusia adalah rasional, dan ketika mereka memakai alasan-alasan pada hubungan internasional mereka dapat membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua pihak. Opini publik adalah kekuatan yang konstruktif; menghilangkan diplomasi rahasia dalam perundingan antara negara-negara dan malahan membuka diplomasi untuk penyelidikan publik guna menjamin perjanjian itu akan masuk akal dan adil. Singkatnya, modernisasi dan interdependensi menimbulkan suatu proses perubahan dan kemajuan yang mengubah barang dan penggunaan kekuatan semakin diabaikan.[[50]](#footnote-50)

Adalah berguna untuk membagi liberalisme pascaperang menjadi empat aliran pemikiran utama: liberalisme sosiologis, liberalisme interdepedensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan.[[51]](#footnote-51) Keempat aliran ini disebut aliran utama karena aliran-aliran tersebut menunjukkan aspek-aspek paling penting dari pemikiran kaum liberal saat ini tentang hubungan internasional. Namun untuk menyesuaikan teori dengan penelitian, liberalisme yang akan dibahas hanya sebatas liberalisme sosiologis dan interdependensi.

1. Liberalisme sosiologis

Kaum liberal sosiologis menolak pandangan bahwa Hubungan Internasional adalah studi tentang hubungan antara pemerintah negara-negara yang berdaulat semata. HI bukan hanya tentang hubungan negara-negara; tetapi juga tentang masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. Dalam memfokuskan hubungan internasional, kaum liberal sosiologis kembali ke tema lama dalam pemikiran kaum liberal: pemikiran bahwa hubungan antara rakyat itu lebih kooperatif dan lebih mendukung perdamaian daripada hubungan antara pemerintah nasional. Karl Deutsch adalah figur terkemuka dalam studi hubungan transnasional sepanjang 1950-an. Ia dan rekannya berupaya mengukur besarnya komunikasi dan transaksi di antara masyarakat. Deutsch berpendapat bahwa derajat hubungan transnasional yang tinggi antara berbagai masyarakat mengakibatkan hubungan damai yang memuncak lebih dari sekedar ketiadaan perang (Deutsch *et* *al.,* 1957).

Kami dapat meringkas liberal sosiologis sebagai berikut. HI bukan hanya merupakan studi tentang hubungan antara pemerintah nasional; pakar HI juga mempelajari hubungan antara individu secara pribadi, kelompok, dan masyarakat. Hubungan saling ketergantungan yang tumpang tindih antara masyarakat dipersatukan menjadi lebih kooperatif dibanding hubungan antarnegara sebab negara bersifat ekslusif dan, menurut liberalisme sosiologis kepentingan mereka tidak melebihi dan bertentangan.[[52]](#footnote-52)

1. Liberalisme interdependensi

Interdependensi berarti ketergantungan timbal balik: rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi di mana pun, oleh tindakan rekannya di negara lain.[[53]](#footnote-53)

Robert Keohane dan Joseph Nye, Jr, dalam bukunya yang berjudul *Power and Interdependence* (1997, 2001) memperkenalkan istilah ‘interdependensi kompleks’. Mereka berpendapat bahwa ‘interdependensi kompleks’ pasca perang secara kualitatif berbeda dari yang terdahulu dan merupakan interdependensi yang sederhana.[[54]](#footnote-54) Sebelumnya, hubungan internasional diarahkan oleh para pemimpin negara berhadapan dengan para pemimpin negara lainnya. ‘Politik tingkat tinggi’ keamanan dan kelangsungan hidup memiliki prioraitas atas ‘politik tingkat rendah’ ekonomi dan masalah sosial (Keohane dan Nye, Jr, 1997: 23). Namun, dalam kondisi interdepedensi kompleks, hal itu tidak menjadi masalah lagi karena dua alasan. *Pertama,* hubungan antara negara sekarang ini bukan hanya atau bahkan terutama hubungan antara para pemimpin negara. *Kedua,* ada pula tuan rumah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara.[[55]](#footnote-55) Akibatnya, hubungan internasional menjadi lebih menyerupai politik domestik: ‘isu-isu yang berbeda menggerakan koalisi yang berbeda’. Oleh karena itu, sumber daya kekuatan selain militer semakin penting. Akhirnya, dalam kompleks interdepedensi negara-negara menjadi lebih tertarik dengan ‘politik tingkat rendah’ kesejahteraan dan kurangnya perhatian dengan ‘politik tingkat tinggi’ keamanan nasional.[[56]](#footnote-56) Interdepedensi kompleks jelas menyatakan hubungan yang jauh lebih bersahabat dan kooperatif di antara negara. Menurut Keohane dan Nye, Jr (1996: 29-38) beberapa konsekuensi muncul. *Pertama,* negara-negara akan mengejar terus tujuan yang berbeda dan aktor-aktor transnasional. *Kedua,* sumber daya kekuatan akan sering menjadi spesifik pada bidang isu. *Ketiga,* arti penting organisasi internasional akan semakin meningkat. Mereka adalah arena bagi tindakan politis oleh negara-negara lemah, mereka menggerakan pembentukan koalisi, dan mereka mengatur situasi agenda internasional.[[57]](#footnote-57)

Sementara itu, liberalisme interdepedensi dapat diringkas sebagai berikut. Modernisasi meningkatkan derajat dan ruang lingkup interdepedensi antara negara-negara. Dalam interdepedensi kompleks, aktor-aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang kurang berguna, dan kesejahteraan – bukan keamanan – menjadi tujuan utama dan kepentingan negara-negara. Hal itu berarti bahwa dunia dari hubungan internasional yang lebih kooperatif.[[58]](#footnote-58)

Atas dasar uraian teoritik diatas, penulis berasumsi secara lebih kompleks sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional mengenalkan bahwa setiap negara pasti berpolitik luar negeri dengan membawa kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam prosesnya, dikenalkan pula istilah ‘diplomasi’, sebuah cara yang dilakukan dalam pencapaian kepentingan nasional tersebut. Namun, karena adanya faktor-faktor tertentu: revolusi teknologi, meningkatnya peran masyarakat dalam diplomasi publik, dan peran media, diplomasi jalur tradisional mulai ditinggalkan. Ditambah, globalisasi saat ini yang membuat segalanya tidak ada batasan mengenalkan pada jenis diplomasi yang baru, diplomasi jalur kedua: diplomasi publik.
2. Secara sederhana, cara kerja diplomasi publik melibatkan 9 jalur (sehingga dikenal juga sebagai diplomasi multijalur). Jalur kesembilan yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh media massa memiliki fungsi strategis. Fungsi strategis inilah yang memungkinkan pembentukan opini publik yang akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara.

### 1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan asumsi dan kerangka teori diatas, maka penulis membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**“Pemberitaan Cable News Network (CNN) sebagai media massa dan aktor diplomasi publik mempengaruhi aktivitas diplomasi Amerika Serikat, khususnya dalam perumusan kebijakan luar negeri akibat terbentuknya opini publik.”**

### 1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel Bebas:Pemberitaan Cable News Network (CNN) sebagai media massa dan aktor diplomasi publik. | 1. CNN sebagai media massa referensi publik AS
 | 1. Analisis data Nielsen dari *Pew Research Center* dan cnnpressroom.blogs.cnn.com
 |
| Variabel Terikat:Aktivitas diplomasi Amerika Serikat khususnya dalam perumusan kebijakan luar negeri akibat terbentuknya opini publik. | 1. CNN *Effect*
2. Opini publik pendorong pengambilan keputusan kebijakan luar negeri saat Konflik Bosnia 1992 dan Kosovo 1998.
 | 1. Analisis Gowing (1994) di tulisan Eytan Gilboa dalam *Political Communication* dan hasil analisis framing Entman berita-berita CNN
2. *Human intervene* saat Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998.
 |

### 1.4.4 Skema Kerangka Teoritis

Globalisasi

Aktivitas diplomasi berubah:

Diplomasi tradisional 🡪 diplomasi publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi:

1. Revolusi Teknologi Informasi
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional (diplomasi publik)
3. *Meningkatnya peran media massa*

Negara dengan sistem politik terbuka 🡪 AS

*Media massa* 🡪 CNN 🡪 Aktivitas diplomasi (kebijakan luar negeri)

Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998

*Human intervene*

**1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.5.1 Tingkat Analisis**

Tingkat analisa yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis. Analisa ini adalah suatu tingkat analisa dimana unit analisanya (unit yang dianggap sebagai variabel dependen) pada tingkatan yang lebih tinggi.

Di penelitian ini penulis menempatkan CNN sebagai media massa sebagai variabel bebas dan unit eksplanasinya, aktivitas diplomasi Amerika Serikat sebagai variabel terikat dan unit analisisnya.

**1.5.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode ini digunakan dengan tujuan mengungkapkan peristiwa atau kejadian masa lalu.

Metode historis adalah usaha untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang,[[59]](#footnote-59) serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman di masa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan yang dihadapi berdasarkan sumber data sekunder.[[60]](#footnote-60)

**1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan buku-buku kepustakaan (*literature*), dan bahan-bahan perkuliahan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.[[61]](#footnote-61)

**1.6 Lokasi dan Lamanya Penelitian**

* + 1. **Lokasi Penelitian**

Dalam membantu pembuatan penelitian ini penulis telah mengambil sumber dari lembaga lembaga yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah Perpustakaan Universitas Parahyangan Kampus Ciumbuleuit, Gedung 9 – Lantai 2 dan 3, Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141

**1.6.2 Lama Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan, terhitung mulai bulan Desember 2015 hingga Juli 2016.

**1.7 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas beberapa hal, diantaranya: latar belakang masalah; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka penelitian; metode dan teknik pengumpulan data; serta sistematika penulisan dari masalah yang diteliti.

**BAB II CABLE NEWS NETWORK (CNN) SEBAGAI MEDIA MASSA DAN AKTOR DIPLOMASI PUBLIK**

Bab ini membahas secara terperinci mengenai profil, fungsi, dan faktor yang memerkuat CNN sebagai media massa dan aktor diplomasi publik.

**BAB III PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Bab ini menjelaskan aktor yang berperan dan pengaruhnya, serta birokrasi yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

**BAB IV CABLE NEWS NETWORK (CNN) DALAM AKTIVITAS DIPLOMASI AMERIKA SERIKAT DILIHAT DARI KASUS KONFLIK BOSNIA 1992 DAN KOSOVO 1998**

Bab ini mengupas peran CNN dalam aktivitas diplomasi Amerika Serikat, khususnya saat pengambilan kebijakan luar negeri pada studi kasus Konflik Bosnia 1992 dan Konflik Kosovo 1998. Kupasan akan menggunakan teori bingkai analisis dari Robert M. Entman dan CNN *Effect*.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

1. Sukawarsini Djelantik, “Diplomasi: Redefinisi Peran dan Aktivitas Diplomat di Era Informasi” dalam Yulius P. Hermawan (Ed.), *TRANSFORMASI dalam STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2007) hlm. 51-52. [↑](#footnote-ref-1)
2. A professor who was a pre-eminent figure in the study of international relations; his career, first as a diplomat and later as an academic, combined the practice and the theory of international politics in a way that afforded him a unique insight into this complex and evolving subject.

“Professor Adam Watson”, dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1564415/Professor-Adam-Watson.html>, The Telegraph, 28 Maret 2007, diakses tanggal 8 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit*., hlm. 59 [↑](#footnote-ref-3)
4. A management consultant at the State Department. He is Vice Chairman of the board of directors of the global research firm InterMedia, a board member of the Salzburg Global Seminar, a member of the Washington Institute of Foreign Affairs, and a senior consultant for PRO-telligent, LLC. He is the author of State Gets SMART (2009), Leveraging Technology in the Service of Diplomacy (2002), and project director and author of the CSIS study, Reinventing Diplomacy in the Information Age (1998).

“Fulton, Barry”, dalam <http://www.publicdiplomacycouncil.org/sites/default/files/users/Lisa%20Retterath/FULTON.pdf>, diakses tanggal 8 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit*., hlm. 60 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.*, hlm. 66 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.*, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 62 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm. 52-53 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arie Indra Chandra, “Peran Media Massa Sebagai Pencipta Realitas Kedua dalam Politik Global” dalam Yulius P. Hermawan (Ed.), *TRANSFORMASI dalam STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2007) hlm. 240-241. [↑](#footnote-ref-12)
13. Brian White, Richard Little, dan Michael Smith, (eds.) (1997). *Issues in World Politics*. USA: St. Martin’s Press, Inc., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Arie Indra Chandra, *Op.Cit*., hlm. 241-242 [↑](#footnote-ref-14)
15. Eytan Gilboa, “*The* CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations” dalam Political Communication (Taylor & Francis Inc., 2005) hlm. 29. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Eytan Gilboa, *Op.Cit.,* hlm. 30. [↑](#footnote-ref-19)
20. Arie Indra Chandra, *Op.Cit*., hlm. 243 [↑](#footnote-ref-20)
21. “The Balkan Crisis: A brief history”, dalam <http://edition.cnn.com/SPECIALS/1997/bosnia/history/>, diakses tanggal 14 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-21)
22. DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar HUBUNGAN INTERNASIONAL* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*., hlm. 2 [↑](#footnote-ref-23)
24. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman) (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2014), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-24)
25. Drs. Mohammad Shoelhi, M.B.A., M.M., *KOMUNIKASI INTERNASIONAL PERSPEKTIF JURNALISTIK* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.*, hlm. 26-27 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.*, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.*, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*., hlm. 31 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.*, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-32)
33. Drs. Alex Sobur, M.Si., *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 161-162 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.*, hlm. 136 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*, hlm. 139-140 [↑](#footnote-ref-35)
36. DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.*, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.*, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.*, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-40)
41. Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik* (Tangerang: GRAHA ILMU, 2008), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.*, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-42)
43. Robert Jervis, “System Theoris and Diplomatic History” dalam Paul Gordon Lauren (Ed)., Diplomacy (1979), hlm. 213 [↑](#footnote-ref-43)
44. Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit.*, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.*, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-46)
47. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*, hlm. 174 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.*, hlm. 175 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.*, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid., hlm. 63-64 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.*, hlm. 178 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid.*, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.*, hlm. 185 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.*, hlm. 187 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid.*, hlm. 188-189 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.*, hlm. 189 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid.*, hlm. 190 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid.*, hlm. 192 [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. Bab II [↑](#footnote-ref-59)
60. Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan SKRIPSI* (Bandung: FISIP Universitas Pasundan, 2012), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-61)